

BAB. I

PENDAHULUAN

BAB I tentang pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pasca Perang Dingin 1991 Uni Soviet mengalami kehancuran dan mengakibatkan kemunduran dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hilangnya kekuatan politik dan dominasi internasional yang selama ini ditakuti oleh negara-negara Blok Barat. Kekalahan Uni Soviet atas Amerika Serikat pasca Perang Dingin di nilai banyak pihak sebagai awal kemunculan kekuatan tunggal di dunia internasional yakni Amerika Serikat, dengan demikian Amerika Serikat berusaha memposisikan diri sebagai negara *superpower* serta bertindak aktif dalam isu-isu dan keterlibatan di dunia internasional. Oleh sebab itu muncullah slogan, Amerika Serikat sebagai polisi dunia.

Dengan fakta tersebut secara garis besar Amerika Serikat menjadi pemegang kendali sistem perpolitikan global. Amerika mulai berbenah diri dengan menerapkan beberapa konsep baru dalam memandang perpolitikan global, berbagai pandangan tentang terbentuknya Amerika baru mengumandang dari para eksekutif dan legislatif pemerintahan Amerika.

Pandangan-pandangan intelektual baru menjadi titik balik dari sistem politik konvensional yang dianggap oleh beberapa pihak tidak mencerminkan

Amerika sebagai kekuatan baru dalam dunia politik global. Wacana Amerika Serikat sebagai *New Emerging Forces* menjadi bahan pemikiran yang sangat penting ketika dibawa ke ranah dunia internasional, karena dengan kekuatannya, Amerika mengumpulkan beberapa negara sebagai sekutu dan pendukung kepentingan-kepentingan Amerika Serikat.

Sebagai kekuatan baru, Amerika melakukan perubahan yang cukup signifikan dalam memandang perpolitikan global, hal ini dibuktikan lahirnya pandangan Presiden George Bush mengenai hegemoni Amerika dalam perpolitikan internasional,¹ pandangan tersebut menjadi awal dari berubahnya paradigma kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Perubahan paradigma kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintahan Bush Senior dengan mengeluarkan draft perencanaan sistem pertahanan baru yang kemudian dikenal menjadi Draft Pedoman dan Rencana Pertahanan (**Defence Planning Guidance Draft**) yang menganjurkan dominasi militer dalam kebijakan Amerika Serikat di masa depan.

Dokumen itu, yang di kemudian hari dinamai “Pentagon Paper” menganjurkan *pre-emptive force* yaitu suatu doktrin yang membenarkan Amerika Serikat untuk menghancurkan pihak mana pun yang potensial menjadi ancaman bagi keamanan nasional mereka. Artinya, siapa pun atau negara mana pun yang oleh Amerika Serikat dianggap “mengancam” harus dihancurkan terlebih dulu sebelum ancaman itu menjelma menjadi kenyataan untuk melindungi Amerika Serikat dari senjata pemusnah massal.²

¹ Lea Brilmayer, *American Hegemony: Political Morality in a One-Superpower World* (New Haven: Yale University Press, 1994), 87.

² Charles W. Kegley and Eugene R. Wittkopf, *American Foreign Policy Pattern and Process*, 5th edition (New York: St. Martin's Press 1996), 94-95.

Pemerintahan Bush cenderung menggunakan pendekatan militer dalam menangani konflik eksternal yang berkaitan dengan kepentingan Amerika di kancah politik internasional, daripada menggunakan pendekatan persuasif dengan lebih menekankan kepada lobi-lobi politik atau proses diplomasi dan birokrasi. Lain halnya Presiden Clinton, beliau menggunakan pendekatan persuasif yang menekankan kepada kerjasama antar negara dan mengusung isu-isu *low politics*. Setidaknya ada tiga agenda arahan kebijakan luar negeri baru bagi Amerika Serikat pasca Perang Dingin versi Presiden Clinton, yakni:

1. Mempromosikan gaya berdemokrasi ala Amerika Serikat kepada dunia internasional.
2. Kemakmuran bagi negara Amerika Serikat dan menjalin persahabatan dengan negara lain.
3. Peningkatan sistem keamanan global bagi kepentingan Amerika Serikat dan menjaga stabilitas keamanan internasional.³

Tetapi pendekatan demikian mendapat tentangan sebagian praktisi politik Amerika, bagi kaum neo-konservatif kebijakan luar negeri Clinton dianggap tidak sesuai, mereka berpendapat Pemerintahan Clinton terlalu multilateralistis dan membahayakan berbagai kepentingan Amerika Serikat dan menghambat proses hegemoni. Ketidacocokan pemikiran antara Clinton dan kalangan neo-konservatif menyebabkan ide-ide kaum neo-konservatif tidak diakomodir dengan baik oleh pemerintah berdaulat pada waktu itu. Maka sebagai bentuk perlawanan

³ Congress, House Committee on National Security, *A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, POW/MIA Oversight: Hearing before A National Security Strategy of Engagement and Enlargement*, July 1994.

dari kelompok tersebut lahirlah sebuah institusi pemikiran (*think thank*) yaitu PNAC (Project for the new American Century) pada 3 Juni 1997, dasar pembentukan institusi PNAC dapat terlihat dengan jelas di *Statement of Principlless*:

American foreign and defense policy is adrift. Conservatives have criticized the incoherent policies of the Clinton Administration. They have also resisted isolationist impulses from within their own ranks. But conservatives have not confidently advanced a strategic vision of America's role in the world. They have not set forth guiding principles for American foreign policy. They have allowed differences over tactics to obscure potential agreement on strategic objectives. And they have not fought for a defense budget that would maintain American security and advance American interests in the new century.

We aim to change this. We aim to make the case and rally support for American global leadership.

As the 20th century draws to a close, the United States stands as the world's preeminent power. Having led the West to victory in the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does the United States have the vision to build upon the achievements of past decades? Does the United States have the resolve to shape a new century favorable to American principles and interests...⁴?

Aktor intelektual yang melahirkan proyek *think thank* neo-konservatif ini adalah Dick Cheney, Donald Rumsfeld, William Kristol, Robert Kagan dan Paul Wolfowitz. Pada masanya mereka memiliki kontrol cukup kuat di Pemerintahan Amerika Serikat sekaligus sebagai politikus unggul Amerika.

Secara garis besar, pandangan mengenai politik neo-konservatif dilandaskan kepada asumsi yaitu: penggunaan kekuatan militer dan melakukan politik secara uniteralis (jika mengharuskan) dalam mencapai kepentingan nasional demi mencegah tindakan atau ancaman dari negara-negara yang disebut autokrasi dan rezim berbahaya serta aktor-aktor non-negara seperti terorisme

⁴ *Statement of Principlless*. 1997 (accessed March 13, 2008); available from <http://www.newamericancentury.org/statementofprinciplless>

internasional.⁵ Landasan politik neo-konservatif ini tertuang dalam sebuah blueprint yang dikeluarkan PNAC pada bulan September 2000 yaitu draft paper berjudul *Rebuilding America's Defense: Strategy, Forces and Resources for a New Century*. Tulisan ini bermula dari premis bahwa

As the 20 th century draws to a close, the United States stands as the world's most preeminent power. Having led the West to victory in the Cold War, America faces an opportunity and a challenge: Does the United States have the vision to build upon the achievement of past decades? Does the United States have the resolve to shape a new century favorable to American principles and interests?

"[What we require is] a military that is strong and ready to meet both present and future challenges; a foreign policy that boldly and purposefully promotes American principles abroad; and national leadership that accepts the United States' global responsibilities.

"Of course, the United States must be prudent in how it exercises its power. But we cannot safely avoid the responsibilities of global leadership of the costs that are associated with its exercise. America has a vital role in maintaining peace and security in Europe, Asia, and the Middle East. If we shirk our responsibilities, we invite challenges to our fundamental interests. The history of the 20 th century should have taught us that it is important to shape circumstances before crises emerge, and to meet threats before they become dire. The history of the past century should have taught us to embrace the cause of American leadership ...⁶

Tulisan strategis itu merekomendasikan misi-misi baru bagi kekuatan militer Amerika, termasuk kapabilitas nuklir yang dominan dengan senjata-senjata nuklir generasi terbaru, kekuatan tempur yang siap tempur dan memenangkan berbagai pertempuran besar, serta kekuatan-kekuatan menjalankan "tugas-tugas kepolisian" di seluruh dunia dengan komando Amerika dan bukan Perserikatan Bangsa Bangsa. Hal itu juga menegaskan bahwa keberadaan

⁵ Rusdiyanta dan Fadhillah Fajri, "Neokonservatisme dan Politik Luar Negeri AS Terhadap Islam Politik." *Majalah Trans* Vol. 1, no. 3 (2008), 8.

⁶ *Rebuilding America's Defense: Strategy, Forces and Resources for a New Century*. 2000 (accessed March 13, 2008); available from <http://www.newamericancentury.org/defenseandnationalsecurity>

kekuatan militer Amerika di wilayah-wilayah kritis di seluruh dunia merupakan bentuk aksi yang paling memungkinkan sebagai perwujudan dari status Amerika selaku *superpower* tunggal.

Secara spesifik cetak biru itu menyebutkan kawasan Teluk Persia sebagai tempat bidikan pertama. Mereka mencatat bahwa “Amerika beberapa dekade lalu terus berusaha untuk menjadi pemain utama di bidang keamanan di Teluk. Sementara konflik yang tidak terselesaikan dengan Irak memberi justifikasi yang cepat, kebutuhan akan kehadiran kekuatan militer Amerika di Teluk melampaui isu rezim Saddam Hussein. Sejak lama, Iran menjadi ancaman utama bagi berbagai kepentingan Amerika di kawasan Teluk. Begitu juga dengan Irak.⁷”

Beberapa saran yang ditujukan PNAC kepada Pemerintah Amerika Serikat kerap membawa misi-misi dominasi Amerika Serikat di dunia sehingga kebijakan tersebut tidak mempersepsikan kesatuan dunia melainkan hegemoni Amerika Serikat dalam segi militer, ekonomi dan beberapa tingkatan kehidupan internasional yang cukup signifikan.

Sebagai langkah awal, pada 26 Januari 1998, PNAC mengirim surat ke Presiden Bill Clinton. Surat tersebut berisi saran penyingkiran Saddam Hussein dengan segera karena dianggap mengganggu kepentingan Amerika di kawasan Timur Tengah dan menumpas rezim yang anti demokrasi. Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz, Peter Rodman, Elliot Abrams, Khalilzad, William J. Bennett, Richard Perle, John Bolton, James Woolsey, Richard Armitage dan Robert Zoellick adalah para penandatangan surat itu. Surat yang sama dikirim ke Kongres beberapa bulan

⁷ *Loc. Cit*

setelahnya, kemudian lahir Undang-Undang Pembebasan Irak 1998. Berikut cuplikan sebagian surat dari PNAC kepada pemerintah Clinton:

We are writing you because we are convinced that current American policy toward Iraq is not succeeding, and that we may soon face a threat in the Middle East more serious than any we have known since the end of the Cold War.? In your upcoming State of the Union Address, you have an opportunity to chart a clear and determined course for meeting this threat.? We urge you to seize that opportunity, and to enunciate a new strategy that would secure the interests of the U.S. and our friends and allies around the world.? That strategy should aim, above all, at the removal of Saddam Hussein's regime from power.? We stand ready to offer our full support in this difficult but necessary endeavor...⁸

Pasca tragedy 9/11 WTC, PNAC berinisiatif mengirim surat kepada Presiden George W. Bush tertanggal 20 September 2001, yang berisi tanggapan positif dari pidato Bush untuk memerangi terorisme dan saran tindakan militer segera ke Afghanistan karena dianggap telah melakukan tindakan terorisme dengan mengancam kedaulatan Amerika Serikat, mengganggu keamanan nasional Amerika dan kepentingan-kepentingan vital Amerika Serikat yang lain.

Surat tersebut ditandatangani oleh beberapa anggota PNAC yang mempunyai jabatan penting dalam pemerintahan, mereka adalah William Kristol, Gary Bauer, Jeffrey Bell, William J. Bennett, Jeffrey Bergner, Eliot Cohen, Seth Cropsey, Midge Decter, Thomas Donnelly, Aaron Friedberg, Hillel Fradkin, Francis Fukuyama, Frank Gaffney, Jeffrey Gedmin, Reuel Marc Gerecht, Charles Hill, Bruce P. Jackson, Eli S. Jacobs, Michael Joyce, Donald Kagan, Robert Kagan, Jeane Kirkpatrick, Charles Krauthammer, John Lehman, Clifford May, Richard Perle, Martin Peretz, Norman Podhoretz, Randy Scheunemann, Gary

⁸ *Letters/Statement*, 1998 (accessed March 23, 2008): available from <http://www.newamericancentury.org/letters/statement>

Schmitt, William Schneider, Jr., Richard H. Shultz, Henry Sokolski, Stephen J. Solarz, Vin Weber, Leon Wieseltier, dan Marshall Wittmann.⁹ Tak lama kemudian, tepatnya setelah 17 hari surat tersebut diterima oleh Presiden, Pemerintah Amerika Serikat semakin yakin bahwa tindakan invasi militer ke Afghanistan merupakan jalan terbaik untuk memerangi tindak terorisme.

Surat PNAC berikutnya dengan anjuran menumpas poros jahat (axis of evil) Irak, Iran, dan Korea Utara diterima Bush pada 23 Januari 2003, PNAC berasumsi negara-negara tersebut memiliki program nuklir dan WMD (Weapon of Mass Destruction) sangat membahayakan bagi kemanan dan eksistensi Amerika di Timur Tengah dan Asia Timur.

Anggota PNAC yang menandatangani adalah William Kristol, Gary Bauer, Max Boot, Frank Carlucci, Eliot Cohen, Midge Decter, Thomas Donnelly, Frank Gaffney, Daniel Goure, Bruce P. Jackson, Donald Kagan, Robert Kagan, Lewis E. Lehrman, Tod Lindberg, Rich Lowry, Daniel McKivergan, Joshua Muravchik, Danielle Pletka, Norman Podhoretz, Stephen P. Rosen, Gary Schmitt, Randy Scheunemann, William Schneider, Jr., Richard Shultz, Henry Sokolski, Chris Williams, dan R. James Woolsey.¹⁰ Hasilnya setelah 66 hari surat tersebut diberikan kepada George W. Bush, Amerika Serikat menyerang Irak dengan segenap kekuatan.

Demikian adalah sebagian contoh surat-surat PNAC yang berisi saran/tindakan pengambilan keputusan luar negeri Amerika Serikat dan berbagai

⁹ *Letters/Statement*, 2001 (accessed March 23, 2008): available from <http://www.newamericancentury.org/letters/statement>

¹⁰ *Letters/Statement*, 2003 (accessed March 23, 2008): available from <http://www.newamericancentury.org/letters/statement>

saran lainnya yang berisi dominasi Amerika Serikat di seluruh belahan dunia, tanpa terkecuali.

Dari beberapa pemaparan hubungan-hubungan diatas dapat diketahui bahwa terdapat kepentingan-kepentingan Amerika Serikat dalam kebijakan luar negerinya, selain itu interest group/pressure group dapat ikut dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri serta mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

B. RUMUSAN PERMASALAHAN

Dari latar belakang permasalahan dapat ditarik suatu pertanyaan untuk menjadi pokok permasalahan: **Bagaimana peran PNAC pada proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tahun 1997-2003?**

C. KERANGKA PEMIKIRAN

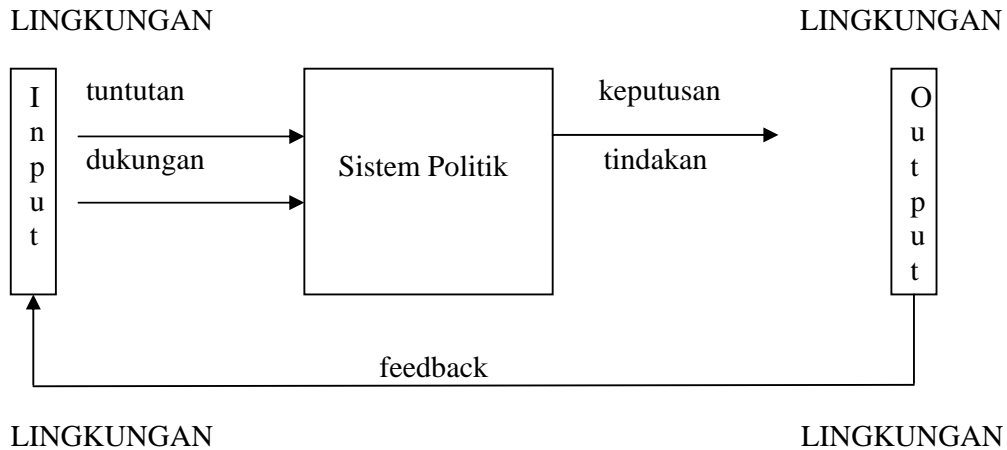
Untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dikemukakan, agar hasil yang dicapai lebih valid, tersistem dan logis, maka penulis menggunakan **Teori Sistem** yang dirumuskan oleh **David Easton** dan **Teori Peran** dari **Heinz Eulau**.

Teori Sistem menjelaskan bahwa suatu kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil konversi dari *input* berupa tuntutan maupun dukungan yang diolah secara sistematis oleh *sistem politik* sehingga menghasilkan keputusan atau tindakan yang disebut *output*. Output yang dihasilkan berupa kebijakan, dapat

diterima atau ditolak oleh lingkungan tergantung pada input yang telah dirumuskan sebelumnya.¹¹

Gambar 1. 1.

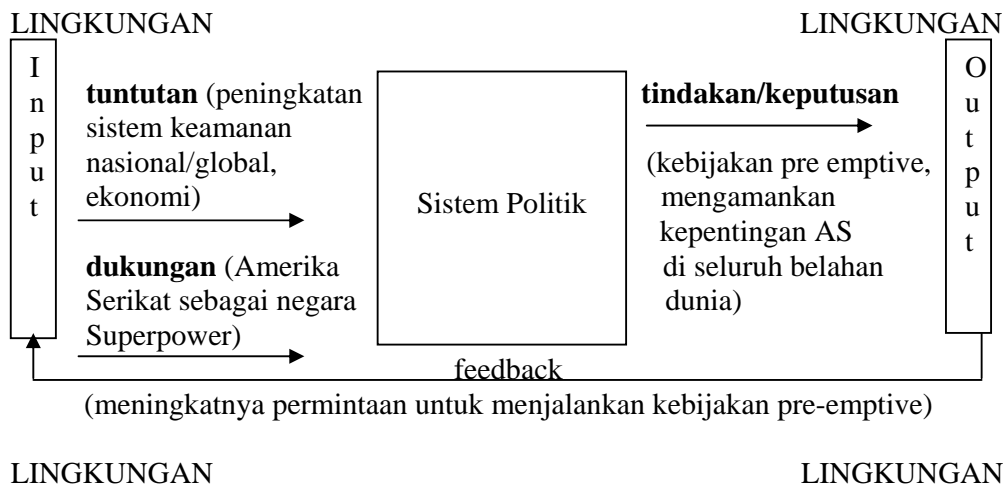
Skema model sederhana dari suatu sistem politik menurut David Easton:



Sumber : David Easton. *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*. (Jakarta. Bina Aksara. 1988), 165.

Gambar 1. 2.

Aplikasi Teori Sistem David Easton:



¹¹ David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (terj.), (Jakarta: Bina Aksara. 1988), 165.

Sebagai salah satu variabel pembuatan kebijakan, input meliputi tuntutan dan dukungan. Bentuk dari tuntutan tidak harus berasal dari sistem yang bersifat high politics, seperti peperangan, revolusi atau trauma sosial. Tetapi bisa berasal dari bentuk tekanan berupa kehidupan politik normal, seperti ekonomi, budaya, sosial, pendidikan dan sebagainya. Easton membagi bentuk tuntutan menjadi dua macam, yakni tuntutan yang berasal dari internal (lingkungan intra sosial) serta bentuk tuntutan yang berasal dari eksternal (lingkungan ekstra sosial).¹²

Menurut Easton, bentuk tuntutan internal bisa dalam bentuk sistem ekologi, sistem biologi, sistem kepribadian dan sistem sosial. Sedangkan bentuk tuntutan eksternal berupa sistem politik internasional, sistem ekologi internasional dan sistem sosial internasional, tuntutan menjadi indeks utama pertama dalam variabel input.

Variabel lain dalam input adalah dukungan, menurut Easton dukungan merupakan bentuk tingkah laku atau yang disebut dengan pandangan atau suasana pikiran. Bentuk dukungan ini seringkali tidak nampak berupa tindakan nyata, bisa saja berupa pernyataan ataupun sikap dari unit-unit di dalam sistem politik ataupun lingkungan. Tetapi dukungan bisa juga berupa sikap-sikap atau kecenderungan yang kuat untuk bertindak demi orang lain.¹³ Dukungan biasanya berasal dari kelompok kepentingan atau unit-unit politik yang membutuhkan

¹² David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (terj.), (Jakarta: Bina Aksara. 1988), 117-120.

¹³ David Easton. *Dalam Perbandingan Sistem Politik* Oleh Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrews. (Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 2001), 12.

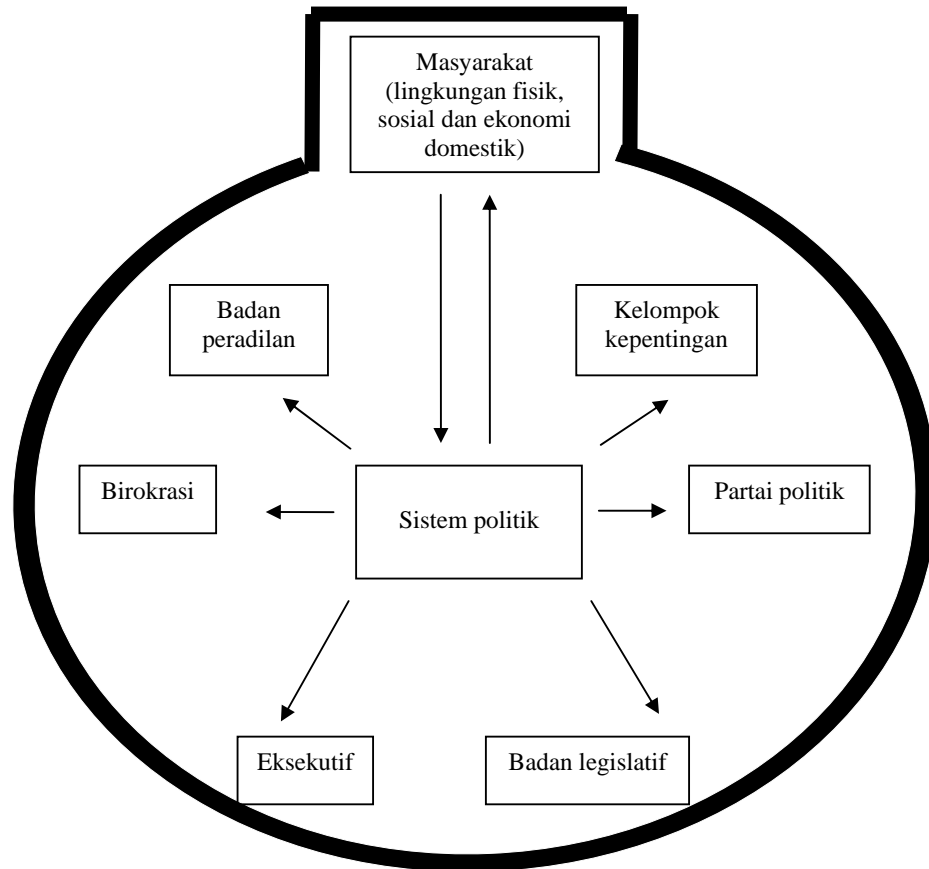
kepemimpinan baru untuk menyelesaikan permasalahan sistem politik. Dukungan menjadi indeks utama kedua dalam variable input.

Tuntutan dan dukungan inilah yang disebut sebagai input, langkah selanjutnya agar proses teori sistem berjalan adalah masuknya input yang meliputi tuntutan dukungan ke sistem politik. Sistem politik adalah alat konversi yang menjembatani input agar dapat terealisasikan menjadi sebuah arah kebijakan.

Sistem politik yang dimaksud dalam pembahasan kali ini adalah negara beserta unit-unit kerjanya. Sistem mungkin terbuka terhadap tekanan tuntutan lewat dua cara, pertama, apabila pihak yang berwenang dalam sistem tersebut tidak mampu atau mau bersedia menghadapi atau memenuhi tuntutan-tuntutan anggota dalam proporsi-proporsi tertentu (paling tidak anggota-anggota politisi yang kuat). Situasi ini dapat menyebabkan kekecewaan dan melahirkan ketidakpuasan para anggota bisa meluap kepada penguasa dan bisa menyebabkan separatisme. Kegagalan Output sebagai akibat ketidakmauan dan ketidakmampuan memenuhi tuntutan, akan cenderung mengarah pada munculnya dukungan yang merusak sistem. Selama tuntutan gagal dipenuhi, ia akan mempunyai akibat-akibat penting terhadap input dukungan. Berikut menunjukkan struktur yang umumnya dimiliki sistem politik

Gambar 1. 3.

Sistem politik dan strukturnya menurut David Easton:

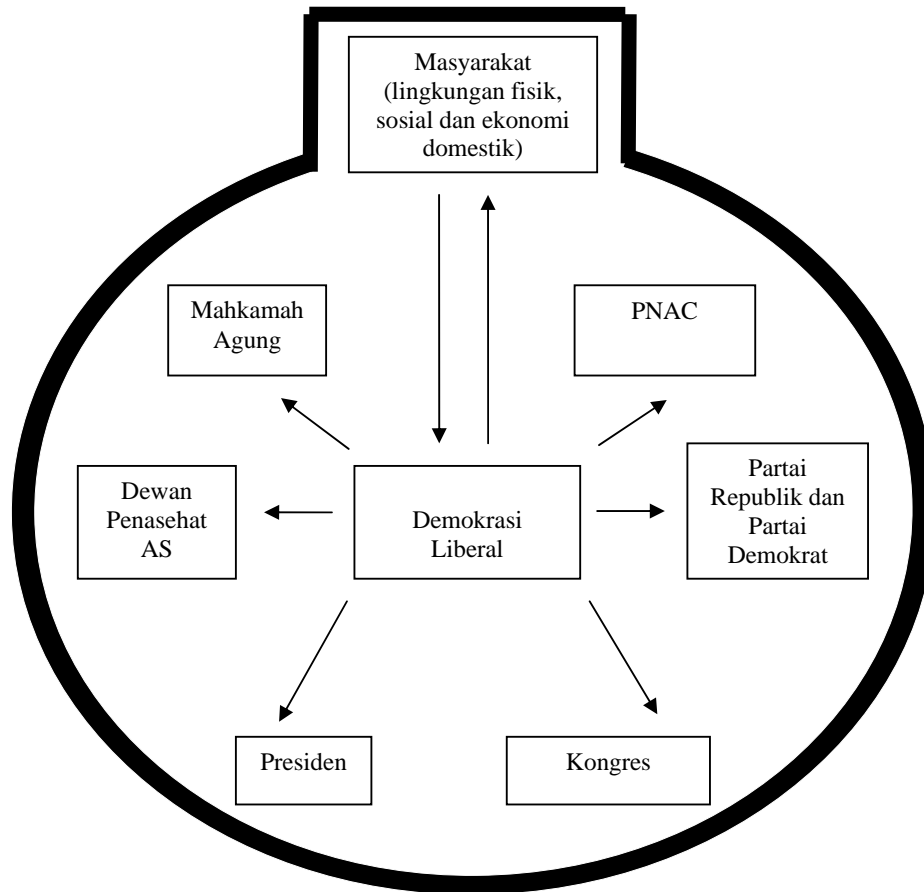


Sumber Mohtar Masoed dan Collin McAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta.

Gajah Mada University Press. 1993), 28.

Gambar 1. 4.

Aplikasi struktur sistem politik David Easton:



Diolah dari sumber: Mohtar Masoed dan Collin McAndrews. *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta. Gajah Mada University Press. 1993), 28.

Disamping itu tuntutan bisa terjadi terlalu banyak dan beragam jenisnya sehingga menyebabkan konflik yang berkepanjangan, dan membutuhkan waktu yang panjang untuk memprosesnya. Dan sistem tidak cukup waktu untuk memproses segala tuntutan dan menyebabkan gambaran bahwa input tuntutan yang terlalu berat.

Variabel selanjutnya yang sangat menentukan adalah variabel output, rumusan Easton tentang output adalah, status-status sistem legal, keputusan-keputusan administrasi, tindakan-tindakan, dekrit-dekrit, undang-undang dan kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya dari pihak penguasa politik, consensus informasi suatu majelis kesukuan dan juga selera dan manfaat para penguasa.¹⁴ Output merupakan bentuk dari ekstraksi antara sistem politik dan permasalahan lingkungan, proses output menghasilkan tindakan atau kebijakan sebagai bentuk langkah preventif dalam memecahkan segala kebuntuan sistem politik yang sedang dihadapi oleh suatu negara.

Variabel output akan menghasilkan efek *feedback* atau yang sering disebut sebagai umpan balik, proses feedback merupakan hasil pencitraan dan tanggapan lingkungan (input) terhadap output yang dihasilkan. Proses feedback sangat penting peranannya pada pemerintah, karena pemerintah dapat mengetahui hasil dari proses kebijakan yang dikeluarkan dari masyarakat.

Teori Peran yang dirumuskan oleh Heinz Eulau menegaskan bahwa, perilaku politik.....adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik.¹⁵ Teori berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Memang kepribadian dan sikap orang yang menjadi menteri luar negeri mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat

¹⁴ David Easton, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik* (terj.), (Jakarta: Bina Aksara. 1988), 186.

¹⁵ Mohtar Mas' oed, *Studi Hubungan Internasional Tingkat Analisis Dan Teorisasi*, (Yogyakarta: PAU-SS-UGM. 1989), 44.

ketika ia menjalankan suatu peranan atau serangkaian peranan, dan fakta inilah yang, menurut teoritis peranan, paling penting diperhatikan.¹⁶

Teori Peran mempunyai dua kemampuan bagi analisis politik, John Wahlke mengungkapkannya, kemampuan pertama adalah Teori Peran mampu menunjukkan bahwa individu politik berusaha untuk menyesuaikan perilaku politiknya dengan norma perilaku politik yang sedang dijalankannya atau peran yang sedang dijalankannya. Kedua, Teori Peran mempunyai kemampuan untuk mendeskripsikan institusi secara behavioral.¹⁷

Berakhirnya Perang Dingin menempatkan posisi Amerika Serikat menjadi pemenang utama atas konflik Amerika Serikat dan Uni Soviet, melalui kemenangan inilah Amerika berusaha menempatkan diri sebagai negara pemenang yang memiliki kekuatan politik luar biasa.

Stigma Amerika Serikat sebagai kekuatan utama dunia internasional inilah yang kemudian memunculkan input, tuntutan dan dukungan agar Amerika Serikat menjadi Negara Superpower dari segenap lingkungan internal maupun eksternal Amerika Serikat. Salah satu bentuk tuntutan yang berasal dari warga negara Amerika Serikat adalah meningkatnya kesejahteraan dan keamanan nasional. Mereka menginginkan peningkatan dalam bentuk kekuatan ekonomi Amerika dan kekuatan militer Amerika Serikat.

Melalui bentuk input tersebut lahirlah kebijakan pre-emptive force yang menggunakan pendekatan militer dan berasumsi peningkatan dalam segi pertahanan Amerika Serikat di seluruh belahan dunia guna mempertahankan

¹⁶ *Ibid*, p.44-45

¹⁷ Alan C. Isaak, *Scope And Methods of Political Science*, 3 rd ed. (Illinois: The Dorsey Press. 1981), 254.

kepentingan dan eksistensi. Kebijakan pre-emptive dijalankan dengan sepenuh hati oleh pemerintahan George Bush.

Pada masa pemerintahan Clinton, stigma tersebut berubah menjadi bentuk kebijakan multilateralisme yang menekankan kepada penggunaan instrumen diplomasi dan persatuan global, kebijakan ala Clinton dikritisi oleh kaum neo konservatif, mereka mempunyai pendapat bahwa kebijakan tersebut membahayakan kepentingan Amerika Serikat di internasional dan menghambat hegemoni. Mereka menyebut pemerintahan Clinton sebagai “incoherent policies,” “squandering the opportunity,” dan “inconstant leadership,”¹⁸

Bentuk tuntutan tersebut yang kemudian di respon oleh salah satu kelompok kepentingan Amerika Serikat, yaitu Project for the New American Century, yaitu suatu proyek *think thank* Amerika yang diketuai oleh William Kristol dan terdapat beberapa pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif didalam unit kerjanya. PNAC sendiri mempunyai tujuan untuk memperkuat kekuatan pertahanan Amerika dan Amerika dapat menjalankan fungsinya sebagai pemimpin dunia internasional. Menurut pandangan PNAC, Amerika merupakan negara yang unggul dalam hal ekonomi, militer, teknologi serta layak menjadi pemimpin internasional dibandingkan dengan negara lain.¹⁹

Melalui kemampuan yang dimiliki, PNAC memberi pengaruh kepada sistem politik dalam pembuatan keputusan luar negeri Amerika Serikat berdasarkan kepada input-input yang ada. PNAC beranggapan bahwa kontrol

¹⁸ Duane Shank, “Project for the New American Century,” *Sojourners Journal*, no. 7 (2004): 12.

¹⁹ *Project for the New American Century: Info and Sources* (accessed June 1, 2007): available from <http://www.opednews.com>

Amerika terhadap negara-negara lain harus dipertegas melalui penambahan kekuatan militer dan pengamanan kepentingan politik Amerika di seluruh kawasan meliputi Eropa, Asia dan Timur Tengah, serta mewaspadaikan kemungkinan munculnya ancaman bagi kepentingan Amerika.

Peran para anggota PNAC yang mempunyai karakter neo-konservatif dalam kalangan pembuat keputusan di Amerika secara otomatis akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan luar negeri Amerika Serikat, sehingga kebijakan yang disarankan PNAC selalu mendapat tempat yang strategis untuk dapat menjadi alternatif kebijakan. Posisi para anggota PNAC yang cukup penting membuat kebijakan yang selama ini menunjukkan arah diplomasi dan containment secara diam-diam berpindah menjadi pre-emptive karena anggota PNAC dapat menjalankan perannya secara optimal dalam lingkaran pembuat keputusan luar negeri Amerika.

Usaha PNAC untuk mewujudkan tujuannya adalah dengan memberi saran dan alternatif kebijakan kepada pembuat kebijakan yaitu pemerintah, PNAC berusaha mengirimkan ide-idenya melalui surat yang ditandatangani oleh beberapa orang anggota PNAC untuk kemudian diberikan kepada presiden.

Melalui faktor-faktor tersebut maka dihasilkan kebijakan-kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang sesuai dengan kepentingan Amerika Serikat.

D. HIPOTESA

PNAC memiliki peran sebagai kelompok kepentingan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat melalui cara:

1. Melakukan lobi kepada pemerintah yang sedang berkuasa.
2. Menempatkan personilnya di posisi penting pemerintahan agar terlibat secara langsung dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.
3. Bekerjasama dengan media massa dan kelompok kepentingan lain yang pro terhadap pemikiran neo-konservatif.

E. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

1. Demi kepentingan penulis, penelitian ini dilakukan untuk memahami dan mengerti lebih lanjut Ilmu Pengetahuan Umum, serta lebih mendalami fenomena yang terjadi di dalam Ilmu Hubungan Internasional yang selama ini dipelajari dalam sistematika perkuliahan.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan hipotesa yang dikemukakan penulis serta menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan.
3. Penelitian ini juga dimaksudkan sebagai syarat penulis mendapat gelar Sarjana Strata I Ilmu Hubungan Internasional.

4. Mengetahui peran “Project for the New American Century” pada proses pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat tahun 1997-2003.

F. JANGKAUAN PENELITIAN

Studi penelitian ini dimulai pada tahun 1997 yaitu sejak lahirnya PNAC dan akan berakhir pada tahun 2003 yaitu saat Amerika Serikat melakukan tindakan militer ke Irak. Penelitian ini tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan proses pengumpulan data pada tahun-tahun sebelumnya yang dianggap relevan guna mendukung kelancaran data penelitian.

G. METODE PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder yang berasal dari buku literatur, laporan hasil penelitian, jurnal, majalah, surat kabar, dokumen dan data berasal dari internet (website) untuk mendukung berjalannya penelitian.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, latar belakang masalah, rumusan permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II berisikan tentang latar belakang berdirinya PNAC, posisi PNAC dalam produk politik luar negeri Amerika Serikat, menunjukkan PNAC sebagai kelompok kepentingan di Amerika Serikat, serta perkembangan PNAC di

Amerika Serikat, meliputi perkembangan pada masa Presiden Bill Clinton dan masa Presiden George W. Bush.

Bab III Menjelaskan bagaimana perspektif PNAC dalam produk politik luar negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa neo-konservatif sebagai dasar pemikiran PNAC dalam setiap langkah politik yang dijalankan. Serta contoh produk politik luar negeri yang dipengaruhi PNAC antara lain: Iraq Liberation Act, *War on Terrorism* yaitu invasi Amerika ke Afghanistan dan invasi Amerika ke Irak.

Bab IV Menjelaskan bagaimana peran PNAC pada proses pengambilan kebijakan luar negeri Amerika Serikat dengan melihat cara PNAC melakukan lobi terhadap pemerintah, menempatkan anggotanya di posisi strategis pemerintahan serta bekerjasama dengan media dan kelompok kepentingan lain yang pro terhadap pemikiran neo-konservatif.

Bab V berisikan tentang kesimpulan dari keseluruhan bab dan penutup.